

**MANAJEMEN KOLABORASI PELAKSANAAN
PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DI DESA BURAI KECAMATAN TANJUNG BATU
KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

MUHAMMAD RISKY WINDINATA

07011381520145

Konsentrasi Manajemen Sektor Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**MANAJEMEN KOLABORASI PELAKSANAAN PROGRAM
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI DESA BURAI
KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

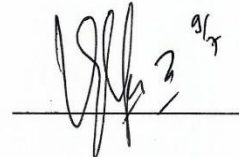
MUHAMMAD RISKY WINDINATA

07011381520145

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2020

Pembimbing I

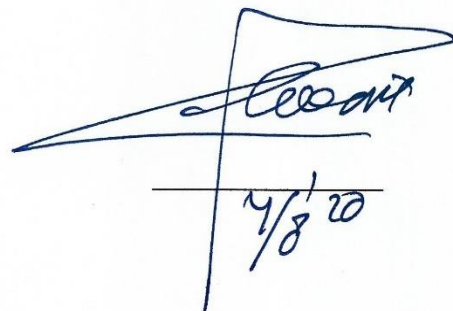
Dr. Nengyanti, M.Hum
196704121992032002



Handwritten signature of Dr. Nengyanti, M.Hum, with the date 2/8/20 written next to it.

Pembimbing II

Drs. Joko Siswanto, M.Si
195706051985031004



Handwritten signature of Drs. Joko Siswanto, M.Si, with the date 4/8/20 written below it.

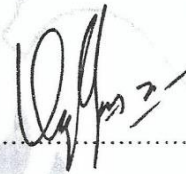
HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Manajemen Kolaborasi Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir*” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Pada Tanggal 11 Agustus 2020.

Indralaya, 11 Agustus 2020

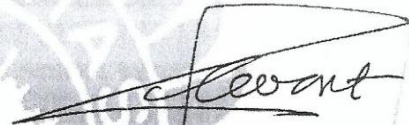
Ketua

1. Dr. Nengyanti, M. Hum
NIP. 196704121992032002

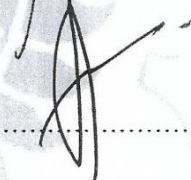


Anggota

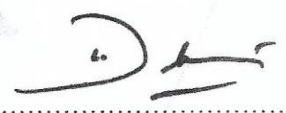
2. Drs. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195706051985031003



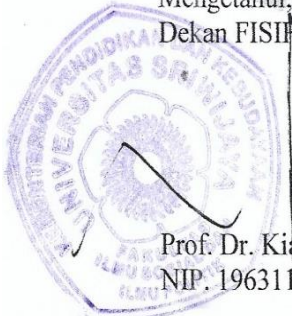
3. Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001



4. Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002



Mengetahui,
Dekan FISIP



Prof. Dr. Kingus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

LEMBAR PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Q.S Al-Baqarah: 286)

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

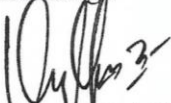
1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Ifran Bakarusin dan Siti Aisyah Ali
2. Saudaraku, Apriansyah, S.E dan Yanuar Fadhli, S.Kom
3. Teman-teman Seperjuanganku dan teman-teman Organisasi
4. Almamaterku Tercinta Universitas Sriwijaya

ABSTRAK


Tujuan Program Kampung Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait, dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Namun dalam pelaksanaan kegiatan lintas sektor belum berjalan secara kolaborasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Manajemen Kolaborasi Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektor Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Latar belakang penelitian ini adalah belum terlaksananya secara kolaborasi kegiatan lintas sektor program kampung keluarga berencana berseri di Desa Burai. Penelitian ini menggunakan teori Djuhendi Tadjudin, terdapat tiga tahapan pengelolaan manajemen kolaboratif yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses kolaborasi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kegiatan lintas sektor program kampung keluarga berencana berseri di Desa Burai belum berjalan sesuai dengan tujuan program, hal ini terjadi karena kurangnya komitmen dari kelompok kerja, sehingga proses pelaksanaan kegiatan lintas sektor Kampung KB Berseri di Desa Burai masih berjalan secara ego sektoral. Model kolaborasi yang digunakan adalah *reactive model*, karena kelompok kerja dapat memilih untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini yang disebabkan oleh belum lengkapnya peraturan yang digunakan. Jadi, saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu perlu adanya modifikasi peraturan oleh *leading sector* secara lebih jelas, karena belum ada standar operasional prosedur atau regulasi khusus mengenai bentuk, pola, maupun model kolaborasi antar kelompok kerja. Sehingga kelompok kerja bisa lebih berkomitmen dalam mendukung kegiatan lintas sektor program kampung keluarga berencana berseri di Desa Burai.

Kata Kunci: Manajemen Kolaborasi, Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

Pembimbing I


Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002

Pembimbing II


Drs. Joko Siswanto, M.Si
195706051985031003

Indralaya,
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

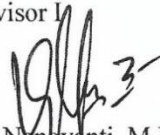

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP 198108272009121002

ABSTRACT

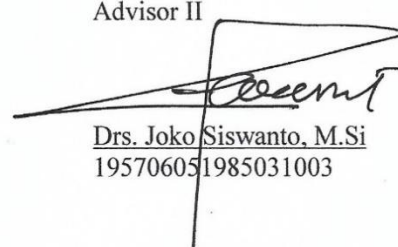
The purpose of family planning program is to improve life quality of the society in village through the KKBPK program and to build a sector linked, in purpose to reach a quality of little family. But, in the implementation, the activity of cross sector has not run collaboratively. Because of that, this study head to get to know further how the management collaboration of cross sector activity implementation in family planning village program at Burai Village, Tanjung Batu Subdistrict, Ogan Ilir Regency. The study background is cross sector activity collaboration of family planning village program has not been implemented yet at Burai Village. This study uses theory of Djuhandi Tadjudin, there are three steps of managing management collaboration that is planning, implementation, and evaluation. The type of this study is descriptive with qualitative method with data collective method is done through documentation technique, observation, and interview. Result of this study reveals that collaboration process implemented by team work of cross-sector activity in family planning village program at Burai Village has not yet been implemented according to the program objectives. This result appears because less of commitment by team work, so that implementation process of cross-sector activity in family planning village at Burai Village still goes in sectoral ego. The model of collaboration used is reactive model as team work is able to choose to participate or not participate in this implementation activity. So, the suggestion related to the results of this study is that there is a need for more clear modification of regulations by the leading sector, because there is no standard operating procedure or special regulation regarding the form, pattern, or model of collaboration between team work. So that team work is able to have more commitment in supporting cross-sector activity in family planning village program at Burai Village.

Keywords: Management Collaboration, Family Planning Village Program at Burai Village Tanjung Batu Subdistrict Ogan Ilir Regency.

Advisor I


Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002

Advisor II


Drs. Joko Siswanto, M.Si
195706051985031003

Indralaya,
Head of Publik Administration Departement
Faculty of Sosial and Political Scienes
Sriwijaya University,


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Manajemen Kolaborasi Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Program Strata satu (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, kasih sayang, pengorbanan serta do'a yang tulus untuk penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Ifran Bakarusin dan Ibu Siti Aisyah Ali, B.A, saudaraku Apriansyah, S.E dan Yanuar Fadhli, S.Kom, Saudariku Siti Nabilah Khairiyah serta keponakanku Salsabila Ramadhani yang telah memberikan kasih sayang, do'a dan pengorbanan yang tak terhitung sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Prof Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
7. Ibu Dr. Nengyanti, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Joko Siswanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan selama proses penyelesaian Skripsi ini
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan bantuan selama perkuliahan dan seluruh karyawan FISIP yang telah membantu penulis dalam skripsi ini
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2015, terkhusus Elman Nefan, Doni, Akbar, David, Nadzir, Anca, Leo, Fadli, Herika, Rita, Ayu, Gasela, dan Wella yang telah kebersamai dalam proses perkuliahan
10. Teman-teman Racana Sultan Mahmud Badaruddin II dan Putri Rambut Selako Pramuka Universitas Sriwijaya, terkhusus Kak Feldi, Kak Bakri, Kak Hafizah, Kak Ratih, Kak Javista (Jeje), Kak Resky, Kak Reni, Kak Litya, Kak Suwanto, Kak Putra, Kak Ilham, Kak Khusairi, Kak Khaidir (Aceng), Kak Yeri, Kak Yeni, Kak Ulya, Kak Sofwan, Kak Akmal, Kak Ikhlas dan Kak Panji
11. Sahabat-sahabatku Elan, Hafizah, Li Junsu, Adel, Ganjar, Agung, Uca, Desy, Baref, Reza, Nanang, Rani, Putri, Bella, Madri dan Reza Firdaus
12. Kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DPPKBP3AD) terima kasih atas izin dan waktu yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-Nya untuk kita semua.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi nusa dan bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun kearah yang lebih baik sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Indralaya, Agustus 2020

Muhammad Risky Windinata

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
B. Manajemen Kolaborasi	10
1. Definisi Manajemen Kolaborasi	12
2. Tahapan Pengelolaan Manajemen Kolaboratif	13
3. Model Manajemen Kolaborasi.....	14
4. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kolaborasi	15
C. Konsep Kampung KB.....	16
1. Definisi Kampung KB	16
2. Tujuan Kampung KB	17
3. Ruang Lingkup Kegiatan Kampung KB.....	18
D. Penelitian Terdahulu	18
E. Kerangka Pemikiran	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Definisi Konsep	23
C. Fokus Penelitian.....	24
D. Jenis dan Sumber Data.....	25
1. Jenis Data	25
2. Sumber Data.....	25
E. Informan Penelitian	26
F. Teknik Pengumpulan Data	26
1. Dokumentasi	27
2. Observasi	27

3. Wawancara.....	27
G. Teknik Analisis Data	27
1. Reduksi Data.....	28
2. Penyajian Data	28
3. Menarik Kesimpulan	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
1. Kabupaten Ogan Ilir.....	30
2. Desa Burai	31
a. Letak Administratif Desa Burai	31
b. Letak Geografis dan Topografi Desa Burai	32
c. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian Desa Burai.....	32
3. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ogan Ilir	33
a. Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ogan Ilir	33
1. Visi	33
2. Misi.....	33
b. Susunan Kepegawain dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ogan Ilir.....	34
c. Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ogan Ilir	34
4. Program Kampung KB di Desa Burai	55
B. Hasil dan Pembahasan	56
1. Manajemen Kolaborasi Kegiatan Lintas Sektor Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir	57
2. Analisis dan Intrepretasi Manajemen Kolaborasi Kegiatan Lintas Sektor Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir	59
a. Perencanaan.....	59
1. Program Kerja.....	59
2. Sumber Daya Manusia.....	61
3. Sumber Daya Finansial	64
b. Pelaksanaan	66
1. Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	67
2. Komitmen Para Pelaksana	68
c. Evaluasi	71
1. Laporan Kerja	71
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Desa Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Ogan Ilir	5
2. Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektor di Desa Burai oleh Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Ilir	7
3. Penelitian Terdahulu	18
4. Perbandingan Penelitian	20
5. Fokus Penelitian.....	25
6. Rencana Kerja Kelompok Kerja Kampung KB Berseri Desa Burai	60
7. Sumber Daya Manusia yang Tergabung di Dalam Kelompok Kerja Kegiatan Lintas Sektor Program Kampung KB Berseri Desa Burai	63
8. Kegiatan-kegiatan lintas sektor yang dilaksanakan Kelompok Kerja	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran	22
2. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Perda No 59 Tahun 2016	35
3. Struktur Pengurus Kampung Keluarga Berencana Berseri Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu.....	63
4. Wawancara bersama petugas lini lapangan berkenaan dengan perencanaan Kegiatan lintas sektor program kampung keluarga berencana	64
5. Pelaksanaan Forum Musyawarah	68
6. Penanaman padi perdana dan pembuatan kolam ikan	71
7. Aplikasi Khusus Kegiatan Lintas Sektor Program Kampung KB Berseri Desa Burai Program Kampung KB Berseri Desa Burai	73

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Tugas Pembimbing.....	78
2. Kartu Bimbingan Proposal Pembimbing I.....	79
3. Kartu Bimbingan Proposal Pembimbing II	80
4. Lembar Revisi Seminar Proposal	81
5. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi	85
6. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I	86
7. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 2.....	87
8. Lembar Revisi Ujian Skripsi.....	88
9. Surat Izin Penelitian.....	92
10. Surat Balasan Instansi.....	98
11. Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 288 Tahun 2017 Tentang Desa Kampung Keluarga Berencana.....	103
12. Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 294 Tahun 2017 Tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Ilir	107
13. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Berseri Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu	111

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

BALITBANGDA	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
BKKBN	: Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
<i>Consensus</i>	: Kesepakatan kata atau permufakatan bersama
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DPPKBP3AD	: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah
Integrasi	: Pembauran hingga menjadi kesatuan yg utuh atau bulat
Interdependen	: Saling tergantung
KB	: Keluarga Berencana
KKBPK	: Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Kolaborasi	: Kerja Sama
Kontrasepsi	: Cara untuk mencegah kehamilan
Koordinasi	: Perihal mengatur suatu organisasi
MKJP	: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
Nawacita	: Sembilan Cita-cita
Prioritas	: Yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Revolusi	: Perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat
RW	: Rukun Warga
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
<i>Stakeholders</i>	: Pemangku Kepentingan
TP-PKK	: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk merupakan modal dasar untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan yang cepat serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak baik tentunya akan mempersulit tercapainya tujuan pembangunan dan menimbulkan masalah peningkatan jumlah penduduk. Namun sebaliknya, keberhasilan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk akan mendorong pembangunan disemua aspek dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak urutan keempat di dunia setelah negara Cina, India dan Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, jumlah penduduk di Indonesia telah mencapai 258.704.986 jiwa dan masih akan terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah penduduk sedemikian banyak tentunya menimbulkan berbagai permasalahan yang terjadi, khususnya kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan pertumbuhan penduduk ini sudah menjadi masalah yang mendesak negara-negara di dunia. Mulyadi (2003:16) menyatakan bahwa tingginya angka pertumbuhan penduduk yang terjadi di negara sedang berkembang dapat menghambat proses pembangunan. Salah satu yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat ialah karena adanya ketimpangan antara jumlah penduduk dengan pertumbuhan ekonomi dan kesehatan. Selain banyaknya kemiskinan yang terjadi, pertumbuhan penduduk yang pesat juga berdampak pada ledakan penduduk. Pada tahun 1970 pemerintah Indonesia sudah berupaya mengambil langkah mengatasi permasalahan penduduk dengan menjalankan program Keluarga Berencana (KB) yang dikelola oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan pernah terbukti menekan laju pertumbuhan

penduduk di Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan penduduk pada tahun 1971-1980 adalah 2,31%. Jika dilihat dalam sepuluh tahun berikutnya, angka ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 1,47% pada tahun 1990-2000. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 mencapai 237.641.326 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49%. Artinya, ada penambahan sekitar 3 juta penduduk setiap tahun. Dengan pertumbuhan sebesar ini, pada tahun 2016 jumlah penduduk Indonesia mencapai 258.704.986 jiwa. Ledakan penduduk yang terjadi ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah agar mengambil upaya lain untuk mengatasi permasalahan ini.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak hanya memfokuskan pada masalah pengendalian penduduk saja, namun masalah pembangunan keluarga juga harus mendapatkan perhatian. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas kewenangan tersebut, dimana pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Empat sub urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan perintah yaitu: (1) sub urusan Pengendalian Penduduk, (2) sub urusan Keluarga Berencana, (3) sub urusan Keluarga Sejahtera, (4) sub urusan Sertifikasi dan Standarisasi.

Dengan arah kebijakan pembangunan nasional pemerintah periode 2015-2019, BKKBN diberikan amanat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas ke-3 “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”, agenda prioritas ke-5 “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” serta agenda prioritas ke-8 “Revolusi karakter bangsa” melalui pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta melaksanakan strategi pembangunan Nasional 2015-2019 melalui pembangunan bidang kesehatan mental atau karakter (revolusi mental) untuk di integrasikan ke dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Dalam langkah penguatan Program KKBPK 2015-2019, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo mengamanatkan BKKBN agar dapat menyusun suatu program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019 dan menjadi ikon BKKBN serta dapat secara langsung bersentuhan dengan masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. Dalam hal ini kemudian disepakati BKKBN membentuk Kampung Keluarga Berencana (KB). Berdasarkan petunjuk teknis kampung KB (2015:3-4) menjelaskan bahwa Kampung Keluarga Berencana (KB) merupakan satuan wilayah setingkat Desa/ Kelurahan yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis dan sistematis. Kampung Keluarga Berencana (KB) menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK. Kegiatannya dikelola berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Pemerintah hanya menstimulasi dan melakukan pendampingan, selebihnya menjadi tanggung jawab masyarakat.

Menurut Zuhriyah (2017:2) Kampung KB merupakan salah satu bentuk atau model miniatur pelaksanaan total program KKBPK secara utuh di lini lapangan yang melibatkan seluruh Bidang lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan kementerian atau Lembaga, Mitra kerja, *stakeholders* instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Kegiatan di Kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya. Kampung KB dapat dijadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya perubahan cara berpikir masyarakat ke arah yang lebih baik. Desa yang dulunya tertinggal, terbelakang, kumuh dan warganya kurang berpendidikan, melalui Program Kampung KB menjadi desa yang maju dan berkembang.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Program Kampung KB dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (2015:8) ada beberapa kriteria yang menentukan layak atau tidaknya sebuah daerah dijadikan Kampung KB antara lain: Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 tingkat desa/kelurahan kampung tersebut berada. Serta jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan kampung tersebut berlokasi. Sedangkan kriteria wilayah dalam pembentukan Kampung KB mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu), yaitu: 1. Kumuh 2. Pesisir atau Nelayan 3. Daerah Aliran Sungai (DAS) 4. Bantaran kereta api 5. Kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan) 6. Terpencil 7. Perbatasan 8. Kawasan Industri 9. Kawasan Wisata 10. Padat Penduduk.

Program kampung KB terus dikembangkan di setiap wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang telah melaksanakan Program Kampung KB. Pada tahun 2018 melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Daerah (DPPKBP3AD) Kabupaten Ogan Ilir sudah ada 28 Kampung KB yang tersebar di 16 Kecamatan yang dicanangkan. Adapun di bawah ini desa-desa di Kabupaten Ogan Ilir yang telah dicanangkan menjadi Kampung KB sebagai berikut:

Tabel 1. Desa Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Ogan Ilir

No	Kecamatan	Nama Desa Kampung KB	Nama Kampung KB	Tahun Pencanaan
1	Muara Kuang	Kaelampadu	Lavender	2017
		Srikembang	Tegar	2018
2	Tanjung Batu	Burai	Berseri	2016
		Tanjung Atap	Indah	2017
3	Tanjung Raja	Belantai	Belanti Hebat	2017
4	Indralaya	Tanjung Seteko	Gemilang	2017
5	Pemulutan	Sembadak	Seroja	2017
		Pegayut	Harapan	2018
6	Rantau Alai	Talang Sari	Talang Sari	2017
		Sanding Marga	Mutiara	2018
		Tanjung Emas	Bunga Desa	2018
7	Indralaya Utara	Palemraya	Palem	2017
8	Indralaya Selatan	Arisan Gading	Makmur	2017
		Soak Batok	Ikhlas	2018
9	Pemulutan Selatan	Ulak Aur Standing	Harapan Baru	2017
		Sungai Ondok	Jaya Bersama	2018
10	Pemulutan Barat	Arisan Jaya	Plamboyan	2017
		Kamal	Anggrek	2018
		Ulak Petangisan	Serumpun	2018
11	Rantau Panjang	Jaga Raja	Sejahtera	2017
		Rantau Panjang Ilir	Bahagia	2018
12	Sungai Pinang	Tanjung Serian	Elok	2017
13	Kandis	Lubuk Rukam	Hikmah	2017
		Lubuk Segonang	Nurhikmah	2018
14	Rambang Kuang	Sukananti	Tunas Bangsa	2017
		Lubuk Tunggal	Harapan Mulia	2018
15	Lubuk Keliat	Kasih Raja	Perikas	2017
16	Payaraman	Tebedak I	Cendana	2017

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DPPKBP3AD) Kabupaten Ogan Ilir

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu merupakan Desa yang pertama kali dicanangkan menjadi Kampung KB di Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DPPKBP3AD)

Kabupaten Ogan Ilir dicanangkanlah Kampung KB di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu pada tanggal 2 April 2016 yang diresmikan langsung oleh Ketua BKKBN Dr. Surya Chandra Surapaty, MPH., Ph.D.

Latar belakang dipilihnya Desa Burai menjadi Kampung KB ialah melihat dari kriteria wilayah yang berada di aliran sungai, kumuh, jauh dari pusat kota dan tidak adanya transportasi umum menuju ke sana serta tingkat penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah. Kriteria inilah yang dinilai cocok untuk dijadikan Kampung KB, sehingga kegiatan-kegiatan Program Kampung KB bisa tepat sasaran.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Program Kampung KB dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (2015:6) salah satu ruang lingkup kegiatan Kampung KB ialah kegiatan lintas sektor yang terdiri dari kementerian atau Lembaga, Mitra kerja, *stakeholders* instansi terkait sesuai dengan kebutuhan wilayah yang dicanangkan menjadi Kampung KB. Untuk di Kabupaten Ogan Ilir hal ini tercantum di dalam Surat Keputusan Bupati Tahun 2017 Tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Ilir terdapat beberapa instansi dan mitra kerja terkait yang berkolaborasi melaksanakan kegiatan lintas sektor di Kampung KB. Adapun beberapa instansi yang dimaksud ialah, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DPPKBP3AD). Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan kegiatan lintas sektor yang termasuk ke dalam ruang lingkup kegiatan Kampung KB bisa berjalan dengan baik, sehingga

tujuan-tujuan Program Kampung KB yang merupakan tempat terintegrasinya program pembangunan bisa tercapai.

Melihat dari Surat Keputusan Kepala Desa Burai No 12 Tahun 2017 Tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Berseri Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, sudah ada beberapa dinas yang terlibat dalam kegiatan lintas sektor program kampung keluarga berencana. Adapun dibawah ini data yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan lintas sektor kampung KB oleh kelompok kerja di desa Burai, sebagai berikut:

Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektor di Desa Burai oleh Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana

No	Kelompok Kerja	Keterangan
1.	Bidang KKBPK	Sudah Melaksanakan Program Kerja
2.	Bidang Keagamaan	Sudah Melaksanakan Program Kerja
3.	Bidang Kesehatan	Sudah Melaksanakan Program Kerja
4.	Bidang Pertanian dan Perternakan	Sudah Melaksanakan Program Kerja
5.	Bidang Reproduksi	Sudah Melaksanakan Program Kerja
6.	Bidang Ekonomi	Sudah Melaksanakan Program Kerja
7.	Bidang Pendidikan	Sudah Melaksanakan Program Kerja
8.	Bidang Pembinaan Lingkungan	Sudah Melaksanakan Program Kerja

Sumber: Petugas Lini Lapangan Keluarga Berencana, 2019

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan lintas sektor kampung KB di desa Burai semua kelompok kerja sudah melaksanakan kegiatan. Namun, dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan secara berkolaborasi oleh kelompok kerja. Dinas yang terlibat menganggap kegiatan yang dilaksanakan di burai sebagai program kerja dari dinasny masing-masing, karena mereka mempunyai rencana kerja dan kepentingan yang berbeda. Sehingga kegiatan lintas sektor program kampung keluarga berencana berseri desa burai belum berjalan dengan baik.

Kolaborasi merupakan kerjasama antar individu, kelompok atau organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara sendiri-sendiri (Sabaruddin, 2015;25). Hogue (2003:6-8) dalam Sabaruddin (2015:25) menjelaskan sebagai bentuk relasi dan kerjasama antar organisasi, kolaborasi berbeda dengan koordinasi. Perbedaannya terletak pada sifat tujuan kerjasama dan bentuk ketergantungannya. Koordinasi merupakan upaya organisasi dari pihak yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama dengan tujuan yang bersifat statis. Hubungan antar organisasi dalam koordinasi bersifat independen. Pada kolaborasi, seluruh pihak bekerjasama dan membangun *consensus* untuk mencapai suatu keputusan yang menghasilkan kemanfaatan bagi seluruh pihak. Relasi antar pihak bersifat terus menerus dan oleh karena itu kolaborasi dinamis dan saling tergantung (interdependen). Jadi, untuk mencapai keberhasilan kegiatan lintas sektor kampung KB di desa Burai, kelompok kerja harus berkolaborasi dengan baik, sehingga program-program yang telah direncanakan dari kelompok kerja bisa terlaksana.

Masalah belum berjalannya kolaborasi di kegiatan lintas sektor Program Kampung KB ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Ogan Ilir saja, namun rata-rata setiap Kabupaten di Indonesia mempunyai masalah yang sama. Padahal kunci keberhasilan kegiatan lintas sektor Program Kampung KB ialah kolaborasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini ialah Bagaimana Manajemen Kolaborasi Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui manajemen kolaborasi, tahapan manajemen kolaborasi, serta model

manajemen kolaborasi yang ada di Kegiatan Lintas Sektor Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan Konsentrasi Manajemen Sektor Publik tentang Program Kampung Keluarga Berencana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi pemikiran dan masukan, serta sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait agar pelaksanaan program kampung keluarga berencana berjalan dengan baik lagi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2015. Petunjuk Teknis Program Kampung Keluarga Berencana. Jakarta.
- Cresswell, Jhon W. 2014. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 2016. Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Palembang.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwanti, Nurul D. 2016. *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*. Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies FISIPOL UGM.
- Sabaruddin, Abdul. 2015. *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Subarsono, Agustinus. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif (isu-isu kontemporer)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana
- Tadjudin, Djuhendy. 2000. *Manajemen Kolaborasi*. Bogor: Pustaka Latin

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Surat Keputusan Bupati 294/KEP/DPPKBP3AD/2017 Tentang Kelompok Kerja Kampung Berencana Kabupaten Ogan Ilir

Surat Keputusan Kepala Desa Surat Keputusan Kepala Desa Burai No 12/KPTS/KD-BR/2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Berseri Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu

Internet:

<http://bps.go.id>

Diakses pada tanggal 18 Oktober 2018

<http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/1705>

Diakses pada tanggal 30 Juni 2020

Zuhriyah, Aminatuz, dkk.2017. *Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efektifitas Program Keluarga Berencana*. HIGEIA *Journal Of Public Health Research and Development*. Volume 1 No.4. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2018
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/15195>

Ade Febrian, Ranggi. 2016. *Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjaun Konsep dan Regulasi)*. Volume 2 No.1. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2020 <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824>